



**Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**PERSPEKTIF RENCANA  
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL 2010-2014:  
ARAH PENGEMBANGAN WILAYAH  
KAWASAN TIMUR INDONESIA**

**Oleh:**

***Ir. Arifin Rudiyanto, M.Sc., Ph.D***  
**Direktur Pengembangan Wilayah**

**Disampaikan pada acara  
Forum Kepala Bappeda Seluruh Kawasan Timur Indonesia - IV**

**Jakarta, 10 Desember 2009**

# DASAR SUBSTANSI PENULISAN RPJMN 2010 - 2014

## 1. AMANAT UU No. 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 2025

- Memuat tahapan pembangunan dimulai dari RPJMN 1 – RPJMN 4
- Arah pembangunan untuk RPJM ke-2 (2010-2014)

**Memantapkan penataan kembali** Indonesia di segala bidang dengan **menekankan** upaya peningkatan **kualitas sumber daya manusia** termasuk **pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi** serta **penguatan daya saing perekonomian**.

## 2. VISI DAN MISI PRESIDEN

- Visi, Misi dan Program Aksi
- Prioritas Nasional KIB II 2009 – 2014

# RPJMN 2010 - 2014

**Terdiri atas:**

- Buku I** Memuat arah, kebijakan umum, serta prioritas pembangunan nasional.
- Buku II** Memuat arah, kebijakan, dan prioritas untuk bidang-bidang pembangunan.
- Buku III** Memuat arah pembangunan kewilayahan.

# Konstelasi Keterkaitan Antara Buku I, II dan III RPJMN 2010-2014



## KETERANGAN:

1. Sebagai acuan Bidang/ Sektor
2. Sebagai acuan Pengembangan Wilayah
3. Menginformasikan arah dan kebutuhan tiap wilayah
4. Menginformasikan kemampuan pencapaian pada wilayah

## Tata Urut (Flow)

### Keterkaitan Buku I-II-III

1. Buku I yang memuat Prioritas Nasional menjadi masukan di dalam penjabaran arah kebijakan bidang dalam Buku II
2. Buku I memberikan arah kebijakan regional dalam Buku III
3. Buku III memuat kebutuhan & permasalahan strategis masing2 wilayah yang menjadi arahan bidang dalam mengisi kebutuhan wilayah (lokus)
4. Buku II memuat arah kebijakan dan prioritas kegiatan bidang yang akan mengisi kebutuhan wilayah (fokus)

## **VISI PRESIDEN 2010-2014**

# **INDONESIA YANG SEJAHTERA, DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN**

## **MISI**

1. MELANJUTKAN PEMBANGUNAN MENUJU INDONESIA YANG SEJAHTERA
2. MEMPERKUAT PILAR-PILAR DEMOKRASI
3. MEMPERKUAT DIMENSI KEADILAN DI SEMUA BIDANG

## **AGENDA**

1. PEMBANGUNAN EKONOMI DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
2. PERBAIKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN
3. PENEGAKAN PILAR DEMOKRASI
4. PENEGAKAN HUKUM DAN PEMBERANTASAN KORUPSI
5. PEMBANGUNAN YANG INKLUSIF DAN BERKEADILAN

# Perkembangan Lingkungan Eksternal (1)

- Resesi global sejak pertengahan 2008
- Tanda pemulihan ekonomi dunia sudah terlihat sejak akhir 2009:
  - IMF – Oktober 2009 merevisi prospek ekonomi tahun 2009, dari tumbuh negatif -1,4 persen menjadi -1,1 persen
  - Penyebabnya adalah intervensi pemerintah dalam:
    - Mendorong sisi permintaan
    - Mengurangi ketidakpastian dan terjadinya risiko sistemik pada pasar keuangan

# Perkembangan Lingkungan Eksternal (2)

- Pergeseran kekuatan ekonomi global dari Barat ke Timur;
- Namun AS dan negara industri maju lainnya:
  - Tetap menjadi penggerak perekonomian dunia
  - Pasar komoditi ekspor negara berkembang;
- Perekonomian Asia:
  - tetap menjadi kawasan dinamis dan
  - kawasan menarik bagi investasi
  - dengan motor penggerak Cina dan India dan industri Asia lainnya

# Prospek Ekonomi

1. Perekonomian Asia mulai membaik pada triwulan terakhir 2009;
2. Ketahanan ekonomi nasional tetap terjaga dalam menghadapi krisis keuangan dan penurunan ekonomi global;
3. Ekspektasi yang baik terhadap kelanjutan pemerintahan lima tahun mendatang;

# Kerangka Ekonomi Makro 2010-2014

- Pertumbuhan ekonomi:
  - Rata-rata 6,3 – 6,8 persen
  - Mencapai 7 persen pada tahun 2013
  - Minimal 7 persen pada tahun 2014
- Inflasi: rata-rata 4 – 6 persen
- Pengangguran: 5 – 6 persen pada tahun 2014
- Kemiskinan: 8 – 10 persen pada tahun 2014

U R A I A N	RATA-RATA 2010 - 2014
PERTUMBUHAN EKONOMI	6,3 – 6,8
<b>SISI PENGELUARAN</b> Konsumsi Masyarakat Konsumsi Pemerintah Investasi Ekspor Barang dan Jasa Impor Barang dan Jasa	5,4 – 5,5 9,5 – 9,9 9,1 – 11,1 10,4 – 12,2 13,2 – 15,5
<b>SISI PRODUKSI</b> Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Industri Bukan Migas Listrik, Gas, dan Air Konstruksi Perdagangan, Hotel, dan Restoran Pengangkutan dan telekomunikasi Keuangan, Realestate, dan Jasa Perusahaan Jasa-jasa	3,7 – 3,8 2,2 – 2,3 5,5 – 6,0 6,1 – 6,7 12,8 – 13,0 7,5 – 8,0 7,0 – 7,5 13,2 – 14,2 6,2 – 7,7 5,8 – 6,2

# TANTANGAN (1)

1. Keberhasilan proses pembangunan ekonomi tergantung pada kualitas birokrasi. **Keberhasilan reformasi birokrasi menjadi kunci utama.**
2. **Melanjutkan perbaikan kualitas SDM.** Perbaikan kesejahteraan rakyat memerlukan *check and balances* karena itu konsolidasi demokrasi tetap dilanjutkan.
3. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan harus berasal dari peningkatan produktivitas yang ditentukan oleh peningkatan kualitas SDM, manusia bukan hanya faktor produksi tetapi ikut berfungsi mengkoordinasikan faktor produksi dalam kegiatan iptek maka **penguasaan Iptek menjadi faktor penting dalam mencapai pembangunan yang inklusif.**
4. Pertumbuhan ekonomi disertai pemerataan kesejahteraan melalui kebijakan ekonomi yang berpihak. pada Kemiskinan terjadi karena tidak adanya hak dan akses untuk memenuhi kebutuhan pokok. Sehingga diperlukan **penguatan kesejahteraan masyarakat melalui dukungan peningkatan anggaran (pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan bahkan subsidi).**

## TANTANGAN (2)

5. Pembangunan ekonomi bukan hanya mengurangi kemiskinan tetapi juga **memperkuat kapasitas keluarga Indonesia dalam menghadapi berbagai guncangan**. Diperlukan intervensi yang efektif.
6. **Pembangunan infrastruktur makin penting** (tanpa infrastruktur revitalisasi pertanian tidak mungkin berhasil, keluarga miskin terisolir, masalah LH akan muncul).
7. **Pertumbuhan ekonomi tidak boleh merusak lingkungan hidup**. Kerusakan LH akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi menjadi tidak berkelanjutan.
8. Penduduk dunia masih terus akan bertambah, alam semakin penuh dan jenuh untuk memenuhi kebutuhan manusia yang terus bertambah dan berkembang. **Energi, Pangan, dan Air menjadi komoditas yang makin langka dan berharga yang harus diamankan dan dikelola**.

# PRIORITAS NASIONAL

- Prioritas 1 : Reformasi Birokrasi dan “*Good Governance*”
- Prioritas 2 : Pendidikan
- Prioritas 3 : Kesehatan
- Prioritas 4 : Penanggulangan Kemiskinan
- Prioritas 5 : Ketahanan Pangan
- Prioritas 6 : Infrastruktur
- Prioritas 7 : Iklim Investasi dan Bisnis
- Prioritas 8 : Energi
- Prioritas 9 : Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana
- Prioritas 10: Pembangunan Daerah Tertinggal, Terdepan, dan Pascakonflik
- Prioritas 11: Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi
- Prioritas lainnya di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; di bidang Perekonomian; dan di bidang Kesejahteraan Rakyat.

## **PRIORITAS 1 : PROGRAM AKSI BIDANG REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA**

Tema Prioritas: Pemantapan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui terobosan kinerja secara terpadu, penuh integritas, akuntabel, taat kepada hukum yang berwibawa, dan transparan. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang ditopang oleh efisiensi struktur pemerintah di pusat dan di daerah, kapasitas pegawai pemerintah yang memadai, dan data kependudukan yang baik.

SUBSTANSI INTI	K/L
<p><b><u>STRUKTUR</u></b> Konsolidasi struktural dan peningkatan kapasitas kementerian/lembaga yang menangani aparatur negara yaitu Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN), Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan Lembaga Administrasi Negara (LAN) pada 2010; restrukturisasi lembaga pemerintah lainnya, seperti di bidang keberdayaan UMKM, pengelolaan energi, pemanfaatan sumber daya kelautan, restrukturisasi BUMN, hingga pemanfaatan tanah dan penataan ruang bagi kepentingan rakyat banyak selambat-lambatnya 2014.</p>	<p><b>Penanggung Jawab</b> Menunggu arahan Presiden</p> <p><b>Bekerjasama Dengan</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Meneg PAN &amp; Reformasi Birokrasi</li></ol>
<p><b><u>OTONOMI DAERAH</u></b> Penataan otonomi daerah melalui: 1) Penghentian /pembatasan pemekaran wilayah; 2) Peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana perimbangan daerah; dan 3) penyempurnaan pelaksanaan pemilihan kepala daerah.</p>	<ol style="list-style-type: none"><li>2. Mensesneg</li><li>3. Mendiknas</li><li>4. Menperin</li></ol>
<p><b><u>SUMBER DAYA MANUSIA</u></b> Penyempurnaan pengelolaan PNS yang meliputi sistem rekrutmen, pendidikan, penempatan, promosi, dan mutasi PNS secara terpusat selambat-lambatnya 2011.</p>	<ol style="list-style-type: none"><li>5. Meneg KUKM</li><li>6. Menteri ESDM</li><li>7. Menteri KP</li><li>8. Menkeu</li></ol>
<p><b><u>REGULASI</u></b> Percepatan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundangan di tingkat pusat maupun daerah hingga tercapai keselarasan arah dalam implementasi pembangunan, diantaranya penyelesaian kajian 12.000 peraturan daerah selambat-lambatnya 2011.</p>	<ol style="list-style-type: none"><li>9. Meneg PPN/ Kepala Bappenas</li><li>10. Meneg BUMN</li><li>11. Menteri PU</li><li>12. Menhut</li></ol>
<p><b><u>SINERGI ANTARA PUSAT DAN DAERAH</u></b> Penetapan dan penerapan sistem Indikator Kinerja Utama Pelayanan Publik yang selaras antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah</p>	<ol style="list-style-type: none"><li>13. Mentan</li><li>14. Mendagri</li><li>15. Menristek</li></ol>
<p><b><u>PENEGAKAN HUKUM</u></b> Peningkatan integrasi dan integritas penerapan dan penegakan hukum oleh seluruh lembaga dan aparat hukum</p>	<ol style="list-style-type: none"><li>16. Menkumham</li><li>17. Kepala BPN</li><li>18. Sekretaris Kabinet</li></ol>
<p><b><u>DATA KEPENDUDUKAN</u></b> Penetapan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan pengembangan Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan (SIK) dengan aplikasi pertama pada Kartu Tanda Penduduk selambat-lambatnya pada 2011</p>	

## PRIORITAS 2 : PROGRAM AKSI BIDANG PENDIDIKAN

Tema Prioritas: Peningkatan akses pendidikan yang berkualitas, terjangkau, relevan, dan efisien menuju terangkatnya kesejahteraan hidup rakyat, kemandirian, keluhuran budi pekerti, dan karakter bangsa yang kuat. Pembangunan bidang pendidikan diarahkan demi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang didukung keselarasan antara ketersediaan tenaga terdidik dengan kemampuan: 1) menciptakan lapangan kerja atau kewirausahaan dan 2) menjawab tantangan kebutuhan tenaga kerja.

SUBSTANSI INTI	K/L
<p><b><u>AKSES DIKDASMEN</u></b> Peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM) pendidikan dasar dari 95% di 2009 menjadi 96% di 2014 dan APM pendidikan setingkat SMP dari 73% menjadi 76% dan Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan setingkat SMA dari 69% menjadi 85%; Pemantapan/rasionalisasi implementasi BOS, penurunan harga buku standar di tingkat sekolah dasar dan menengah sebesar 30-50% selambat-lambatnya 2012 dan penyediaan sambungan internet ber-<i>content</i> pendidikan ke sekolah tingkat menengah selambat-lambatnya 2012 dan terus diperluas ke tingkat sekolah dasar.</p>	<p><b>Penanggung Jawab</b> Mendiknas</p> <p><b>Bekerjasama Dengan</b> Menkominfo, Menag</p>
<p><b><u>AKSES DIKTI</u></b> Peningkatan APK pendidikan tinggi dari 18% di 2009 menjadi 25% di 2014</p>	
<p><b><u>METODOLOGI</u></b> Penerapan metodologi pendidikan yang tidak lagi berupa pengajaran demi kelulusan ujian (<i>teaching to the test</i>), namun pendidikan menyeluruh yang memperhatikan kemampuan sosial, watak, budi pekerti, kecintaan terhadap budaya-bahasa Indonesia melalui penyesuaian sistem Ujian Akhir Nasional pada 2011 dan penyempurnaan kurikulum sekolah dasar-menengah sebelum tahun 2011 yang diterapkan di 25% sekolah pada 2012 dan 100% pada 2014.</p>	
<p><b><u>PENGELOLAAN</u></b> Pemberdayaan peran Kepala Sekolah sebagai <i>manager</i> sistem pendidikan yang unggul, revitalisasi peran Pengawas Sekolah sebagai entitas <i>quality assurance</i>, mendorong aktivasi peran Komite Sekolah untuk menjamin keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses pembelajaran, dan Dewan Pendidikan di tingkat Kabupaten.</p>	
<p><b><u>KURIKULUM</u></b> Penataan ulang kurikulum sekolah yang dibagi menjadi kurikulum tingkat nasional, daerah, dan sekolah sehingga dapat mendorong penciptaan hasil didik yang mampu menjawab kebutuhan SDM untuk mendukung pertumbuhan nasional dan daerah dengan memasukkan pendidikan kewirausahaan (diantaranya dengan mengembangkan model <i>link and match</i>).</p>	
<p><b><u>KUALITAS</u></b> Peningkatan kualitas guru, pengelolaan dan layanan sekolah, melalui: 1) program remediasi kemampuan mengajar guru; 2) penerapan sistem evaluasi kinerja profesional tenaga pengajar; 3) sertifikasi ISO 9001:2008 di 100% PTN, 50% PTS, 100% SMK sebelum 2014; 4) membuka luas kerjasama PTN dengan lembaga pendidikan internasional; 5) mendorong 11 PT masuk Top 500 THES pada 2014; 6) memastikan perbandingan guru:murid di setiap SD &amp; MI sebesar 1:32 dan di setiap SMP &amp; MTs 1:40; dan 7) memastikan tercapainya Standar Nasional Pendidikan (SNP) bagi Pendidikan Agama dan Keagamaan paling lambat tahun 2013.</p>	

### **PRIORITAS 3 : PROGRAM AKSI BIDANG KESEHATAN**

**Tema Prioritas:** Penitikberatan pembangunan bidang kesehatan melalui pendekatan preventif, tidak hanya kuratif, melalui peningkatan kesehatan masyarakat dan lingkungan diantaranya dengan perluasan penyediaan air bersih dan pengurangan wilayah kumuh sehingga secara keseluruhan dapat meningkatkan angka harapan hidup dari 70,6 tahun pada 2009 menjadi 72,0 tahun pada 2014, dan pencapaian keseluruhan sasaran Millenium Development Goals (MDGs) tahun 2015.

<b>SUBSTANSI INTI</b>	<b>K/L</b>
<p><b><u>KESEHATAN MASYARAKAT</u></b> Pelaksanaan Program Kesehatan Preventif Terpadu yang meliputi pemberian imunisasi dasar kepada 90% balita pada 2014; Penyediaan akses sumber air bersih yang menjangkau 67% penduduk dan akses terhadap sanitasi dasar berkualitas yang menjangkau 75% penduduk sebelum 2014; Penurunan tingkat kematian ibu saat melahirkan dari 307 per 100.000 kelahiran pada 2008 menjadi 118 pada 2014, serta tingkat kematian bayi dari 34 per 1.000 kelahiran pada 2008 menjadi 24 pada 2014.</p>	<p><b>Penanggung Jawab</b> Menkes</p> <p><b>Bekerjasama Dengan</b> 1. Menteri PU 2. Mensos</p>
<p><b><u>KB</u></b> Peningkatan kualitas dan jangkauan layanan KB melalui 23.500 klinik pemerintah dan swasta selama 2010-2014.</p>	
<p><b><u>SARANA KESEHATAN</u></b> Ketersediaan dan peningkatan kualitas layanan rumah sakit berakreditasi internasional di minimal 5 kota besar di Indonesia dengan target 3 kota pada 2012 dan 5 kota pada 2014.</p>	
<p><b><u>OBAT</u></b> Pemberlakuan Daftar Obat Esensial Nasional sebagai dasar pengadaan obat di seluruh Indonesia dan pembatasan harga obat generik bermerek pada 2010.</p>	
<p><b><u>ASURANSI KESEHATAN NASIONAL</u></b> Penerapan Asuransi Kesehatan Nasional untuk seluruh keluarga miskin dengan cakupan 100% pada 2011 dan diperluas secara bertahap untuk keluarga Indonesia lainnya antara 2012-2014.</p>	

**PRIORITAS 4 : PROGRAM AKSI PENANGGULANGAN KEMISKINAN**

Tema Prioritas : Penurunan tingkat kemiskinan absolut dari 14,1% pada 2009 menjadi 8-10% pada 2014 dan perbaikan distribusi perawatan dengan perlindungan sosial yang berbasis keluarga, pemberdayaan masyarakat dan perluasan kesempatan ekonomi masyarakat yang berpendapatan rendah.

SUBSTANSI INTI	K/L
<p><b><u>BANTUAN SOSIAL TERPADU</u></b> Integrasi program perlindungan sosial berbasis keluarga yang mencakup program Bantuan Langsung Tunai (BLT) baik yang bersifat insidensial atau kepada kelompok marginal, program keluarga harapan, bantuan pangan, jaminan sosial bidang kesehatan, beasiswa bagi anak keluarga berpendapatan rendah, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan <i>Parenting Education</i> mulai 2010 dan diperluas menjadi program nasional mulai 2011-2012.</p>	<p><b>Penanggung Jawab</b> Wakil Presiden</p> <p><b>Bekerjasama Dengan</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menkokesra</li><li>2. Menko Perekonomian</li><li>3. Menkes</li><li>4. Mendiknas</li><li>5. Mensos</li><li>6. Menkeu</li><li>7. Meneg KUKM</li><li>8. Meneg PPN/kepala Bappenas</li></ol>
<p><b><u>PNPM MANDIRI</u></b> Penambahan anggaran PNPM Mandiri dari Rp 10,3 trilyun pada 2009 menjadi Rp 12,1 trilyun pada 2010, pemenuhan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Rp 3 milyar per kecamatan untuk minimal 30% kecamatan termiskin di pedesaan, dan integrasi secara selektif PNPM Pendukung.</p>	
<p><b><u>KREDIT USAHA RAKYAT (KUR)</u></b> Pelaksanaan penyempurnaan mekanisme penyaluran KUR mulai 2010 dan perluasan cakupan KUR mulai 2011.</p>	
<p><b><u>TIM PENANGGULANGAN KEMISKINAN</u></b> Revitalisasi Komite Nasional Penanggulangan Kemiskinan di bawah koordinasi Wakil Presiden, penggunaan <i>unified database</i> untuk penetapan sasaran program mulai 2009-2010, dan penerapan sistem monitoring dan evaluasi yang akurat sebagai dasar keputusan dan alokasi anggaran.</p>	

## **PRIORITAS 5 : PROGRAM AKSI BIDANG KETAHANAN PANGAN**

Tema Prioritas : Peningkatan ketahanan pangan dan lanjutan revitalisasi pertanian untuk mewujudkan kemandirian pangan, peningkatan daya saing produk pertanian, peningkatan pendapatan petani, serta kelestarian lingkungan dan sumber daya alam. Peningkatan pertumbuhan PDB sektor pertanian sebesar 3,7% per tahun dan Indeks Nilai Tukar Petani sebesar 115-120 pada 2014.

SUBSTANSI INTI	K/L
<b><u>LAHAN, PENGEMBANGAN KAWASAN DAN TATA RUANG PERTANIAN</u></b> Penataan regulasi untuk menjamin kepastian hukum atas lahan pertanian, pengembangan areal pertanian baru seluas 2 juta hektar, penertiban serta optimalisasi penggunaan lahan terlantar.	<b>Penanggung Jawab</b> Menko Perekonomian  <b>Bekerjasama Dengan</b> 1. Mentan 2. Menteri PU 3. Menkominfo 4. Menhub 5. Menperin 6. Menkeu 7. Menristek 8. Menkes 9. Meneg LH 10. Kepala BPPT 11. Kepala BPN
<b><u>INFRASTRUKTUR</u></b> Pembangunan dan pemeliharaan sarana transportasi dan angkutan, pengairan, jaringan listrik, serta teknologi komunikasi dan sistem informasi nasional yang melayani daerah-daerah sentra produksi pertanian demi peningkatan kuantitas dan kualitas produksi serta kemampuan pemasarannya.	
<b><u>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</u></b> Peningkatan upaya penelitian dan pengembangan bidang pertanian yang mampu menciptakan benih unggul dan hasil penelitian lainnya menuju kualitas dan produktivitas hasil pertanian nasional yang tinggi.	
<b><u>INVESTASI, PEMBIAYAAN, DAN SUBSIDI</u></b> Dorongan untuk investasi pangan, pertanian, dan industri perdesaan berbasis produk lokal oleh pelaku usaha dan pemerintah, penyediaan pembiayaan yang terjangkau, serta sistem subsidi yang menjamin ketersediaan benih varietas unggul yang teruji, pupuk, teknologi dan sarana pasca panen yang sesuai secara tepat waktu, tepat jumlah, dan terjangkau.	
<b><u>PANGAN DAN GIZI</u></b> Peningkatan kualitas gizi dan keanekaragaman pangan melalui pola pangan harapan.	
<b><u>ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM</u></b> Pengambilan langkah-langkah kongkrit terkait adaptasi dan antisipasi sistem pangan dan pertanian terhadap perubahan iklim.	

**PRIORITAS 6 : PROGRAM AKSI BIDANG INFRASTRUKTUR**

Tema Prioritas : Pembangunan infrastruktur nasional yang memiliki daya dukung dan daya gerak terhadap pertumbuhan ekonomi dan sosial yang berkeadilan dan mengutamakan kepentingan masyarakat umum di seluruh bagian negara kepulauan Republik Indonesia dengan mendorong partisipasi masyarakat.

SUBSTANSI INTI	K/L
<b><u>TANAH DAN TATA RUANG</u></b> Konsolidasi kebijakan penanganan dan pemanfaatan tanah untuk kepentingan umum secara menyeluruh di bawah satu atap dan pengelolaan tata ruang secara terpadu.	<b>Penanggung Jawab</b> Menko Perekonomian
<b><u>JALAN</u></b> Penyelesaian pembangunan Lintas Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Papua sepanjang total 19.370 km pada 2014.	<b>Bekerjasama Dengan</b> 1. Menteri PU 2. Mendagri 3. Menhut
<b><u>PERHUBUNGAN</u></b> Pembangunan jaringan prasarana dan penyediaan sarana transportasi antar-moda dan antar-pulau yang terintegrasi sesuai dengan Sistem Transportasi Nasional dan Cetak Biru Transportasi Multimoda dan penurunan tingkat kecelakaan transportasi sehingga pada 2014 lebih kecil dari 50% keadaan saat ini.	4. Mentan 5. Menkominfo 6. Menhub 7. Menpera
<b><u>PERUMAHAN RAKYAT</u></b> Pembangunan 685.000 Rumah Sederhana Sehat Bersubsidi, 180 Rusunami dan 650 <i>twin block</i> berikut fasilitas pendukung kawasan permukiman yang dapat menampung 836.000 keluarga yang kurang mampu pada 2012.	8. Kepala BPN 9. Kepala BKPM
<b><u>PENGENDALIAN BANJIR</u></b> Penyelesaian pembangunan prasarana pengendalian banjir, diantaranya Banjir Kanal Timur Jakarta sebelum 2012 dan penanganan secara terpadu Daerah Aliran Sungai Bengawan Solo sebelum 2013.	
<b><u>TELEKOMUNIKASI</u></b> Penuntasan pembangunan jaringan serat optik di Indonesia bagian timur sebelum 2013 dan maksimalisasi tersedianya akses komunikasi data dan suara bagi seluruh rakyat.	
<b><u>TRANSPORTASI PERKOTAAN</u></b> Perbaiki sistem dan jaringan transportasi di 4 kota besar (Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan) sesuai dengan Cetak Biru Transportasi Perkotaan, termasuk penyelesaian pembangunan angkutan kereta listrik di Jakarta (MRT dan Monorail) selambat-lambatnya 2014.	

**PRIORITAS 7 : PROGRAM AKSI BIDANG IKLIM INVESTASI DAN IKLIM USAHA**

Tema Prioritas : Peningkatan investasi melalui perbaikan kepastian hukum, penyederhanaan prosedur, perbaikan sistem informasi, dan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

SUBSTANSI INTI	K/L
<p><b><u>KEPASTIAN HUKUM</u></b> Reformasi regulasi secara bertahap di tingkat nasional dan daerah sehingga terjadi harmonisasi peraturan perundang-undangan yang tidak menimbulkan ketidakjelasan dan inkonsistensi dalam implementasinya.</p>	<p><b>Penanggung Jawab</b> Wakil Presiden</p>
<p><b><u>PENYEDERHANAAN PROSEDUR</u></b> Penerapan sistem pelayanan informasi dan perizinan investasi secara elektronik (SPSIE) pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di beberapa kota, yang dimulai di Batam, pembatalan perda bermasalah dan pengurangan biaya untuk memulai usaha seperti Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP).</p>	<p><b>Bekerjasama Dengan</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menko Perekonomian</li><li>2. Menkeu</li><li>3. Menkumham</li><li>4. Meneg PPN/ Kepala Bappenas</li><li>5. Mendag</li><li>6. Menperin</li><li>7. Menhub</li><li>8. Menteri PU</li><li>9. Monkominfo</li><li>10. Mendagri</li><li>11. Kepala BKPM</li><li>12. Kepala BPN</li></ol>
<p><b><u>LOGISTIK NASIONAL</u></b> Pengembangan dan penetapan Sistem Logistik Nasional yang menjamin kelancaran arus barang dan mengurangi biaya transaksi/ekonomi biaya tinggi.</p>	
<p><b><u>SISTEM INFORMASI</u></b> Beroperasinya secara penuh <i>National Single Window</i> (NSW) untuk impor (sebelum Januari 2010) dan ekspor. Percepatan realisasi proses penyelesaian bea cukai di luar pelabuhan dengan implementasi tahap pertama <i>Custom Advanced Trade System</i> (CATS) di <i>dry port</i> Cikarang.</p>	
<p><b><u>KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK)</u></b> Pengembangan KEK di 5 lokasi melalui skema Public-Private Partnership sebelum 2012.</p>	
<p><b><u>KEBIJAKAN KETENAGAKERJAAN</u></b> Sinkronisasi kebijakan ketenagakerjaan dan iklim usaha dalam rangka penciptaan lapangan kerja</p>	

**PRIORITAS 8 : PROGRAM AKSI BIDANG ENERGI**

Tema Prioritas : Pencapaian ketahanan energi nasional yang menjamin kelangsungan pertumbuhan nasional melalui restrukturisasi kelembagaan dan optimasi pemanfaatan energi alternatif seluas-luasnya.

SUBSTANSI INTI	K/L
<b><u>KEBIJAKAN</u></b> Penetapan kebijakan energi yang memastikan penanganan energi nasional yang terintegrasi sesuai dengan Rencana Induk Energi Nasional.	<b>Penanggung Jawab</b> Menteri ESDM
<b><u>RESTRUKTURISASI BUMN</u></b> Transformasi dan konsolidasi BUMN bidang energi dimulai dari PLN dan Pertamina yang selesai selambat-lambatnya 2010 dan diikuti oleh BUMN lainnya.	<b>Bekerjasama</b> <b>Dengan</b>
<b><u>KAPASITAS ENERGI</u></b> Peningkatan kapasitas pembangkit listrik sebesar rata-rata 3.000 MW per tahun mulai 2010 dengan rasio elektrifikasi yang mencakup 62% pada 2010 dan 80% pada 2014; dan produksi minyak bumi sebesar lebih dari 1,2 juta barrel per hari mulai 2014.	1. Meneg BUMN 2. Menristek 3. Kepala BKPM 4. Kepala BPN
<b><u>ENERGI ALTERNATIF</u></b> Peningkatan pemanfaatan energi terbarukan termasuk energi alternatif <i>geothermal</i> sehingga mencapai 2.000 MW pada 2012 dan 5.000 MW pada 2014 dan dimulainya produksi <i>coal bed methane</i> untuk membangkitkan listrik pada 2011 disertai pemanfaatan potensi tenaga surya, <i>microhydro</i> , dan nuklir secara bertahap.	
<b><u>HASIL IKUTAN DAN TURUNAN MIGAS</u></b> Revitalisasi industri pengolah hasil ikutan/turunan minyak bumi dan gas sebagai bahan baku industri tekstil, pupuk dan industri hilir lainnya.	
<b><u>KONVERSI MENUJU PENGGUNAAN GAS</u></b> Perluasan program konversi minyak tanah ke gas sehingga mencakup 42 juta Kepala Keluarga pada 2010; penggunaan gas alam sebagai bahan bakar angkutan umum perkotaan di Palembang, Surabaya, dan Denpasar.	

**PRIORITAS 9 : PROGRAM AKSI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN PENGELOLAAN BENCANA**

**Tema Prioritas : Konservasi dan pemanfaatan lingkungan hidup mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan yang berkelanjutan, disertai penguasaan dan pengelolaan risiko bencana untuk mengantisipasi perubahan iklim.**

SUBSTANSI INTI	K/L
<p><b><u>PERUBAHAN IKLIM</u></b> Peningkatan keberdayaan pengelolaan lahan gambut, peningkatan hasil rehabilitasi seluas 500,000 ha per tahun, dan penekanan laju deforestasi secara sungguh-sungguh diantaranya melalui kerjasama lintas kementerian terkait serta optimalisasi dan efisiensi sumber pendanaan seperti dana luran Hak Pemanfaatan Hutan (IHPH), Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), dan Dana Reboisasi.</p>	<p><b>Penanggung Jawab</b> Meneg LH</p> <p><b>Bekerjasama Dengan</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menhut</li><li>2. Menristek</li><li>3. Menkeu</li><li>4. Mendag</li></ol>
<p><b><u>PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN</u></b> Penurunan beban pencemaran lingkungan melalui pengawasan ketaatan pengendalian pencemaran air limbah dan emisi di 680 kegiatan industri dan jasa pada 2010 dan terus berlanjut; Penurunan jumlah <i>hotspot</i> kebakaran hutan sebesar 20% per tahun dan penurunan tingkat polusi keseluruhan sebesar 50% pada 2014; Penghentian kerusakan lingkungan di 11 Daerah Aliran Sungai yang rawan bencana mulai 2010 dan seterusnya.</p>	
<p><b><u>SISTEM PERINGATAN DINI</u></b> Penjaminan berjalannya fungsi Sistem Peringatan Dini Tsunami (TEWS) dan Sistem Peringatan Dini Cuaca (MEWS) mulai 2010 dan seterusnya, serta Sistem Peringatan Dini Iklim (CEWS) pada 2013.</p>	
<p><b><u>PENANGGULANGAN BENCANA</u></b> Peningkatan kemampuan penanggulangan bencana melalui: 1) penguatan kapasitas aparatur pemerintah dan masyarakat dalam usaha mitigasi risiko serta penanganan bencana dan bahaya kebakaran hutan di 33 propinsi, dan 2) pembentukan tim gerak cepat (unit khusus penanganan bencana) dengan dukungan peralatan dan alat transportasi yang memadai dengan basis di dua lokasi strategis (Jakarta dan Malang) yang dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia.</p>	

**PRIORITAS 10 : PROGRAM AKSI UNTUK DAERAH TERTINGGAL, TERDEPAN, TERLUAR, DAN PASCA-KONFLIK**

Tema Prioritas : Pengutamaan dan penjaminan pertumbuhan di daerah tertinggal, terdepan, terluar serta keberlangsungan kehidupan damai di wilayah pasca-konflik.

SUBSTANSI INTI	K/L
<p><b><u>KEBIJAKAN</u></b> Pelaksanaan kebijakan khusus dalam bidang infrastruktur dan pendukung kesejahteraan lainnya yang dapat mendorong pertumbuhan di daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca-konflik selambat-lambatnya dimulai pada 2011.</p>	<p><b>Penanggung Jawab</b> Menkopolkam</p> <p><b>Bekerjasama Dengan</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Meneg PDT</li><li>2. Mendiknas</li><li>3. Menkes</li><li>4. Menteri PU</li><li>5. Menhub</li><li>6. Menkominfo</li><li>7. Menhan</li><li>8. Menteri KP</li><li>9. Menlu</li><li>10. Mensos</li><li>11. Mendagri</li><li>12. Menristek</li><li>13. Kepala Bakosurtanal</li></ol>
<p><b><u>KERJASAMA INTERNASIONAL</u></b> Pembentukan kerjasama dengan negara-negara tetangga dalam rangka pengamanan wilayah dan sumber daya kelautan.</p>	
<p><b><u>KEUTUHAN WILAYAH</u></b> Penyelesaian pemetaan wilayah perbatasan RI dengan Malaysia, Papua Nugini, Timor Leste, dan Filipina pada 2010.</p>	
<p><b><u>DAERAH TERTINGGAL</u></b> Pengentasan daerah tertinggal di sedikitnya 50 kabupaten paling lambat 2014.</p>	

**PRIORITAS 11****: PROGRAM AKSI BIDANG KEBUDAYAAN, KREATIVITAS, DAN INOVASI TEKNOLOGI**

Tema Prioritas

: Pengembangan dan perlindungan kebhinekaan budaya, karya seni, dan ilmu serta apresiasinya, untuk memperkaya khazanah artistik dan intelektual bagi tumbuh-mapannya jati diri dan kemampuan adaptif kompetitif bangsa yang disertai pengembangan inovasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang dilandasi oleh keunggulan Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan.

SUBSTANSI INTI	K/L
<p><b><u>PERAWATAN</u></b> Penetapan dan pembentukan pengelolaan terpadu untuk pengelolaan Cagar Budaya, revitalisasi museum dan perpustakaan di seluruh Indonesia sebelum Oktober 2011.</p>	<p><b>Penanggung Jawab</b> Menbudpar</p> <p><b>Bekerjasama Dengan</b> Menristek</p>
<p><b><u>SARANA</u></b> Penyediaan sarana yang memadai bagi pengembangan, pendalaman dan pagelaran seni budaya di kota besar dan ibu kota kabupaten selambat-lambatnya Oktober 2012.</p>	
<p><b><u>PENCIPTAAN</u></b> Pengembangan kapasitas nasional untuk pelaksanaan Penelitian, Penciptaan dan Inovasi dan memudahkan akses dan penggunaannya oleh masyarakat luas.</p>	
<p><b><u>KEBIJAKAN</u></b> Peningkatan perhatian dan kesertaan Pemerintah dalam program-program seni budaya yang diinisiasi oleh masyarakat dan mendorong berkembangnya apresiasi terhadap kemajemukan budaya.</p>	
<p><b><u>INOVASI TEKNOLOGI</u></b> Peningkatan keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif yang mencakup pengelolaan sumber daya maritim menuju ketahanan energi, pangan, dan antisipasi perubahan iklim; dan pengembangan penguasaan teknologi dan kreativitas pemuda.</p>	

## PRIORITAS LAINNYA (1)

### BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN

1. Pelaksanaan koordinasi terhadap mekanisme prosedur penanganan terorisme
2. Pelaksaaan program deradikalisasi untuk menangkal terorisme
3. Peningkatan peran Republik Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia
4. Peningkatan pelayanan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri
5. Penguatan dan pemantapan hubungan kelembagaan pencegahan dan pemberantasan korupsi
6. Pelaksanaan perlindungan saksi dan pelapor
7. Pengembalian aset (*asset recovery*)
8. Peningkatan kepastian hukum
9. Penguatan perlindungan HAM
10. Pemberdayaan industri strategis pertahanan

### BIDANG PEREKONOMIAN

1. Pelaksanaan pengembangan industri sesuai dengan Peraturan Presiden No.28/2008 tentang Kebijakan Industri Nasional
2. Peningkatan peran dan kemampuan Republik Indonesia dalam diplomasi perdagangan internasional
3. Peningkatan pelayanan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) selama proses penyiapan, pemberangkatan, dan kepulangan
4. Peningkatan upaya pelayanan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri

## PRIORITAS LAINNYA (2)

### BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT

1. Pelaksanaan ibadah haji yang tertib dan lancar paling lambat pada 2010
2. Peningkatan kerukunan umat beragama melalui pembentukan dan peningkatan efektivitas Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)
3. Peningkatan jumlah wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara sebesar 20% secara bertahap dalam 5 tahun
4. Promosi 10 tujuan pariwisata Indonesia melalui saluran pemasaran dan pengiklanan yang kreatif dan efektif
5. Perbaikan dan peningkatan kualitas jaringan prasarana dan sarana pendukung pariwisata
6. Peningkatan kapasitas pemerintah dan pemangku kepentingan pariwisata lokal untuk mencapai tingkat mutu pelayanan dan hospitality management yang kompetitif di kawasan Asia
7. Perumusan kebijakan dan pedoman bagi penerapan pengarusutamaan (mainstreaming) Gender dan Anak (PUG & A) oleh Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian lainnya
8. Pencapaian posisi papan atas pada South East Asia (SEA) Games pada tahun 2011, peningkatan perolehan medali di Asian Games tahun 2010 dan Olimpiade tahun 2012
9. Peningkatan character building melalui gerakan, revitalisasi dan konsolidasi gerakan kepemudaan
10. Revitalisasi Gerakan Pramuka

## **Buku II:**

# **Arah Kebijakan Bidang-bidang Pembangunan**

- |               |   |
|---------------|---|
| <b>BAB 1</b>  | <b>Kebijakan Pengarusutamaan dan Lintas Bidang</b>  |
| <b>BAB 2</b>  | <b>Bidang Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama</b>  |
| <b>BAB 3</b>  | <b>Bidang Ekonomi</b>                               |
| <b>BAB 4</b>  | <b>Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi</b>        |
| <b>BAB 5</b>  | <b>Bidang Sarana Prasarana</b>                      |
| <b>BAB 6</b>  | <b>Bidang Politik</b>                               |
| <b>BAB 7</b>  | <b>Bidang Pertahanan dan Keamanan</b>               |
| <b>BAB 8</b>  | <b>Bidang Hukum dan Aparatur</b>                    |
| <b>BAB 9</b>  | <b>Bidang Wilayah dan Tata Ruang</b>                |
| <b>BAB 10</b> | <b>Bidang Sumber Daya alam dan Lingkungan Hidup</b> |
| <b>BAB 11</b> | <b>Sistem Pendukung Manajemen Nasional</b>          |

## Buku III:

# Kebijakan Pembangunan Kewilayahan

### ■ Tujuan:

- Mewujudkan pembangunan yang lebih merata ke seluruh wilayah Indonesia dalam kerangka NKRI

### ■ Kebijakan pembangunan kewilayahan dituangkan dalam arah:

#### 1. Pengembangan wilayah pulau-pulau besar

- Mendorong percepatan pembangunan wilayah Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua
- Dengan tetap mempertahankan momentum pembangunan di Jawa-Bali dan Sumatera

#### 2. Pengembangan wilayah laut

- Wilayah pengembangan kelautan Sumatera, Selat Malaka, Jawa, Makassar-Buton, dan Banda-Maluku

#### 3. Pengembangan kawasan

- Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh
- Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, dan Rawan Bencana
- Kawasan Perkotaan dan Perdesaan
- Penataan dan Pengelolaan Pertanahan

**Penyusunan Draft Buku III  
RPJMN 2010-2014  
Berdimensi Kewilayahan**

# TAHAPAN RPJPN 2005-2025

## RPJM 1 (2005-2009)

Menata kembali NKRI, membangun Indonesia yang aman dan damai, yang adil dan demokratis, dengan tingkat kesejahteraan yang lebih baik.

## RPJM 2 (2010-2014)

Memantapkan penataan kembali NKRI, meningkatkan kualitas SDM, membangun kemampuan iptek, memperkuat daya saing perekonomian

## RPJM 3 (2015-2019)

Memantapkan pem-bangunan secara menyeluruh dengan menekankan pem-bangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis SDA yang tersedia, SDM yang berkualitas, serta

## RPJM 4 (2020-2024)

Mewujudkan masya-rakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di segala bidang dengan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif.

# Skala Prioritas RPJM 2010-2014 dalam Bidang Pengembangan Regional & Otonomi Daerah

RPJMN Tahap 2  
(2010-2014)

Memantapkan penataan kembali NKRI, meningkatkan kualitas SDM, membangun kemampuan iptek, memperkuat daya saing perekonomian

Terwujudnya kehidupan bangsa yang lebih demokratis ditandai dengan membaiknya pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah.

Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang lebih murah, cepat, transparan dan akuntabel yang ditandai dengan terpenuhinya Standar Pelayanan Minimum (SPM) di semua tingkatan pemerintahan.

Meningkatnya kesejahteraan rakyat terus meningkat ditunjukkan oleh membaiknya berbagai indikator pembangunan..., menurunnya Kesenjangan kesejahteraan antarindividu, antarkelompok masyarakat dan antardaerah, dipercepatnya pengembangan pusat-pusat pertumbuhan potensial di luar Jawa

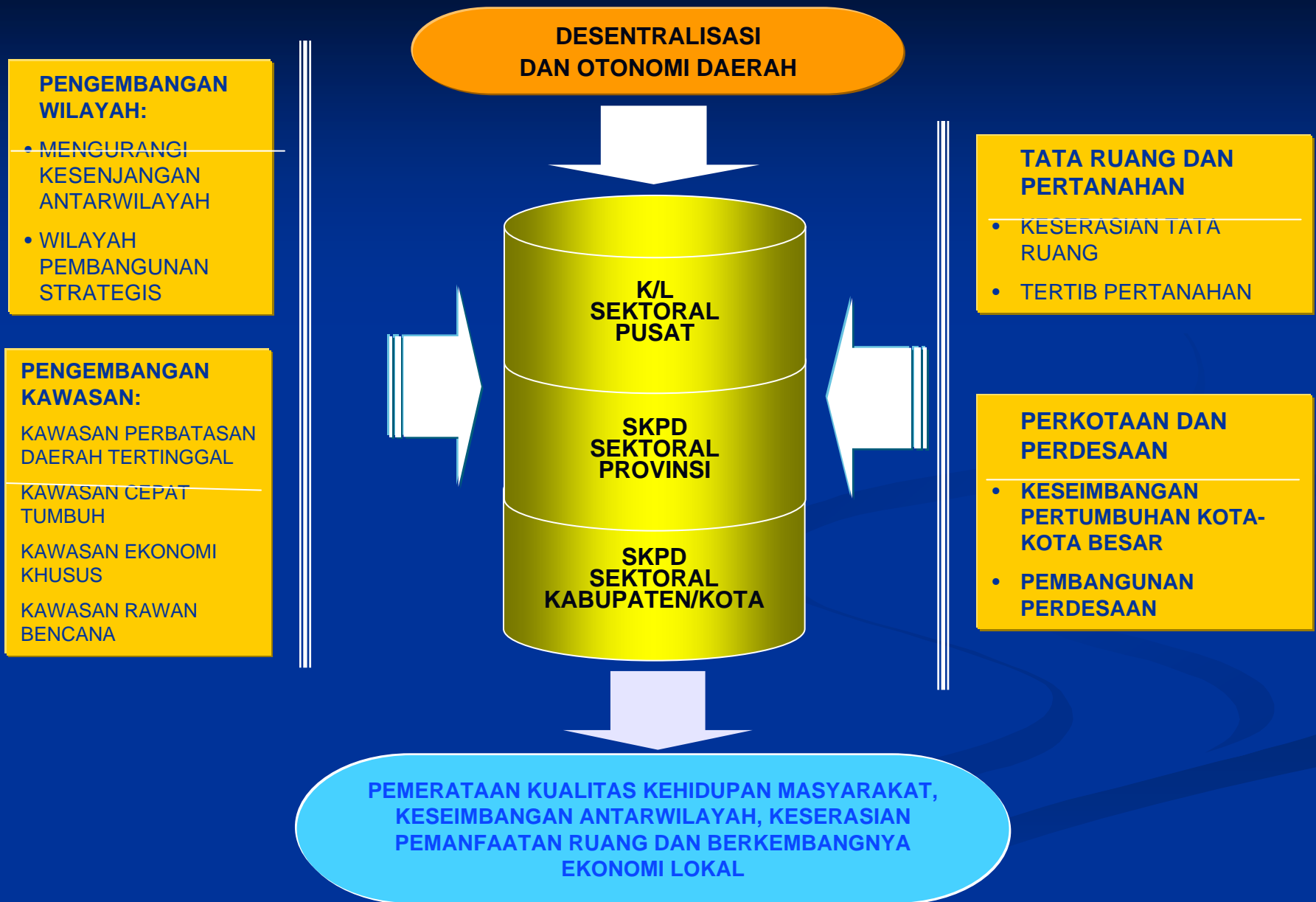
Mantapnya kelembagaan dan kapasitas antisipatif serta penanggulangan bencana di setiap tingkatan pemerintahan

Meningkatnya kualitas perencanaan tata ruang serta konsistensi pemanfaatan ruang dengan mengintegrasikannya ke dalam dokumen perencanaan pembangunan terkait dan penegakan peraturan dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang.

# KESENJANGAN ANTARWILAYAH



# ELEMEN-ELEMEN PEMBANGUNAN DAERAH



# Pendahuluan:

## Upaya Mengurangi Kesenjangan Wilayah

- Pembangunan wilayah di Indonesia belum memberikan kesejahteraan secara merata kepada seluruh penduduk.
- Perkembangan sosial ekonomi global memunculkan beberapa dampak yang terkait dengan pengembangan wilayah:
  - kemunduran kegiatan industri, tuntutan keterbukaan, tuntutan efisiensi, produktivitas dan daya saing, desentralisasi, peningkatan kerawanan sosial, dan kesenjangan antarwilayah.
- Transformasi ekonomi, sosial dan budaya, politik di daerah belum mampu mengoptimalkan sumberdaya untuk pembangunan dan kemajuan daerah.
- Daerah-daerah memiliki karakteristik geografis yang beragam dan membutuhkan perencanaan berbasis karakteristik ruang geografis
- Pengembangan wilayah di Indonesia perlu diarahkan kepada pendekatan yang lebih komprehensif dan disesuaikan dengan dinamika dan kebutuhan setiap masa.
- Optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam memerlukan intervensi kebijakan yang berbasis kewilayahan berdasarkan pemanfaatan sumber daya setempat.
- Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025 mengamanatkan pendekatan regional sebagai salah satu strategi untuk mencapai tujuan pembangunan

## **PENTINGNYA PENYUSUNAN RPJMN 2010-2014 BERDIMENSI KEWILAYAHAN**

- Upaya pengurangan kesenjangan antarwilayah secara lebih terarah dan sistematis dengan skenario yang disepakati semua pihak.
- Terjalin kerjasama lintas sektor dan lintas wilayah dalam pengembangan wilayah.
- Sinergi semua pihak dalam upaya percepatan pengembangan wilayah.
- Sinergi antara prioritas nasional dan kepentingan daerah.
- Terdapat instrumen untuk Musrenbang Nasional, Provinsi dan Kabupaten.

# Tujuan dan Manfaat

- Menjadi landasan konseptual dan arah kebijakan dalam penanganan wilayah Sumatera, Jawa Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.
- Tersusunnya skenario pengembangan wilayah Sumatera, Jawa Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku Dan Papua untuk jangka menengah (5 tahun)
- Menjadi acuan regional dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD)

**Basis Analisis**  
**Penetapan Strategi dan Kebijakan**  
**Pengembangan Wilayah**  
**Tahun 2010-2014**

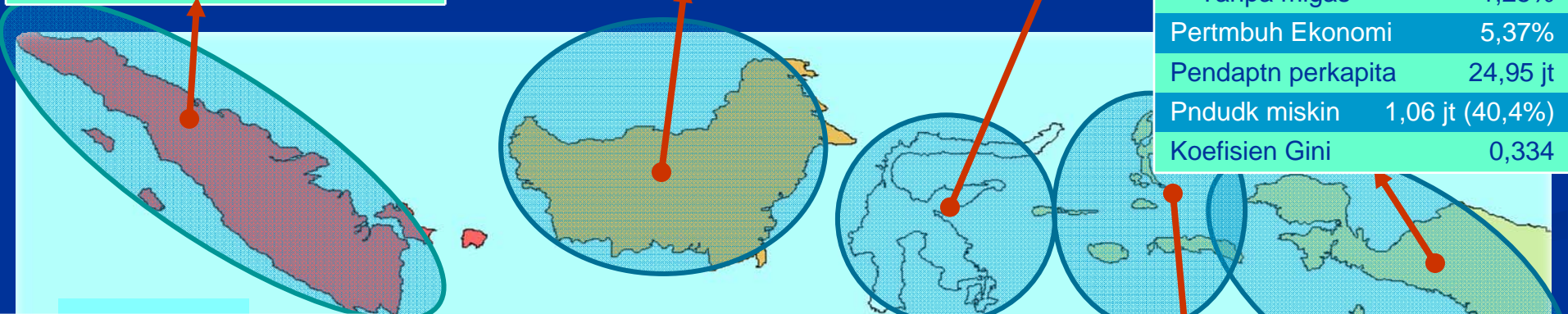
# Indikator Makro Pulau (2007)

Share PDRB thdp Nasional	
Dengan migas	23,02%
Tanpa migas	20,44%
Pertumb. Ekonomi	4,9%
Pendaptn perkapita	16,65 jt
Penduduk miskin	2,0 jt (16,5%)
Koefisien Gini	0,272

Share PDRB thdp Nasional	
Dengan migas	9,13%
Tanpa migas	6,40%
Pertumb. Ekonomi	3,14%
Pendaptn perkapita	24,58 jt
Penduduk miskin	1,35 jt (10,4%)
Koefisien Gini	0,280

Share PDRB thdp Nasional	
Dengan migas	4,06%
Tanpa migas	4,49%
Pertmbh Ekonomi	6,88%
Pendapt perkapita	8,72 jt
Pendudk miskin	1,71 jt (17,0%)
Koefisien Gini	0,274

Share PDRB thdp Nasional	
Dengan migas	1,17%
Tanpa migas	1,25%
Pertmbuh Ekonomi	5,37%
Pendaptn perkapita	24,95 jt
Pndudk miskin	1,06 jt (40,4%)
Koefisien Gini	0,334



Share PDRB thdp Nasional	
Dengan migas	60,21%
Tanpa migas	64,78%
Pertumbuh Ekonomi	6,16%
Pendapt perkapita	15,86 jt
Penduduk miskin	2,17 jt (16,0%)
Koefisien Gini	0,334

Share PDRB thdp Nasional	
Dengan migas	1,56%
Tanpa migas	1,62%
Pertmbuh Ekonomi	4,55%
Pendapt perkapita	5,88 jt
Penduduk miskin	0,23 jt (26,2%)
Koefisien Gini	0,289

Share PDRB thdp Nasional	
Dengan migas	0,25%
Tanpa migas	0,28%
Pertumbuh Ekonomi	5,75%
Pendaptn perkapita	4,50 jt
Penduduk miskin	0,52 jt (23,2%)
Koefisien Gini	0,300

# 3 Sektor Terbesar Penyumbang PDRB Pulau

Nasional	
Industri Pengolahan	25,91%
Perdagangan	18,46%
Pertanian	15,27%

Pertanian	22,1%
Ind. Pengolahan	20,47%
Pertambangan	19,26%

Pertambangan	30,9%
Ind. Pengolahan	27,5%
Pertanian	12,9%

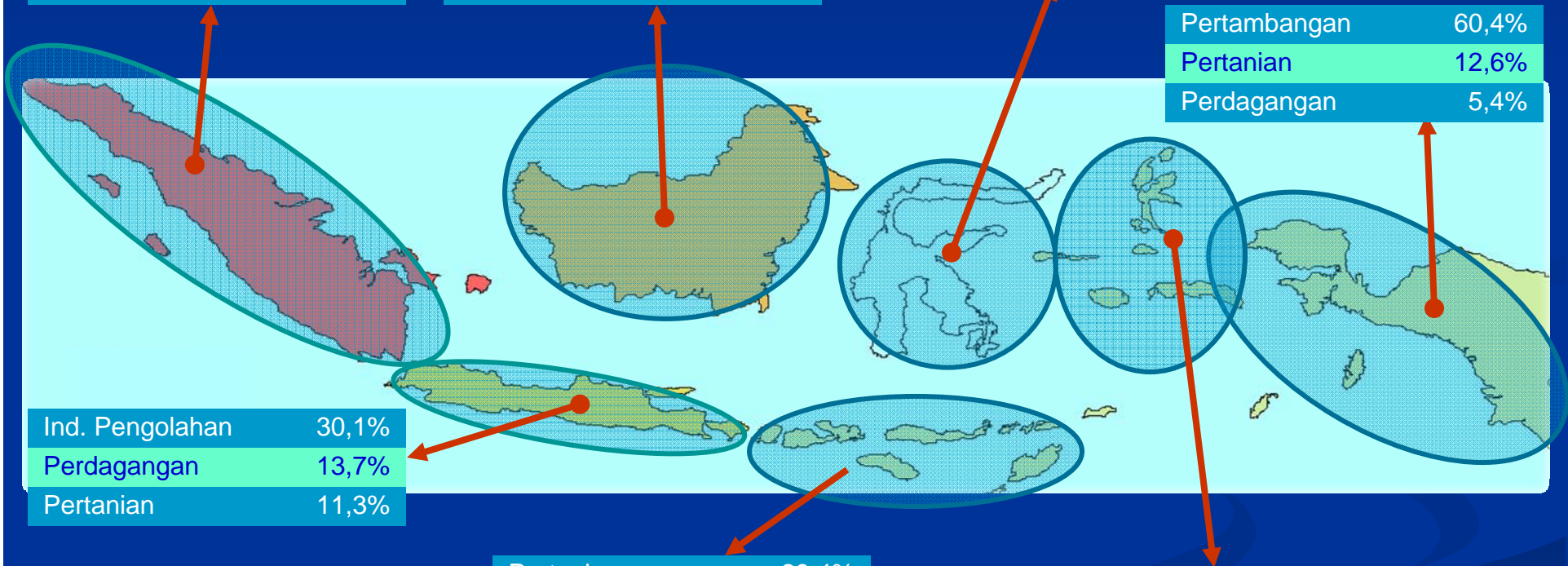
Pertanian	32,6%
Perdagangan	14,8%
Jasa-jasa	13,9%

Pertambangan	60,4%
Pertanian	12,6%
Perdagangan	5,4%

Ind. Pengolahan	30,1%
Perdagangan	13,7%
Pertanian	11,3%

Pertanian	29,4%
Pertambangan	23,1%
Jasa-jasa	13,7%

Pertanian	36,1%
Perdagangan	12,6%
Jasa-jasa	5,4%



## Kontribusi PDRB Menurut Wilayah Terhadap Total PDRB, Tahun 2007

WILAYAH PULAU	Kontribusi Terhadap Total PDRB			
	PDRB dengan Migas		PDRB Tanpa Migas	
	Milyar Rp.	%	Milyar Rp.	%
<b>SUMATERA</b>	810.253,57	22,98	647.224,99	20,40
<b>JAWA - BALI</b>	2.122.702,80	60,20	2.053.925,38	64,75
<b>NUSA TENGGARA</b>	52.655,57	1,49	52.655,56	1,66
<b>KALIMANTAN</b>	321.934,06	9,13	203.061,68	6,40
<b>SULAWESI</b>	144.196,11	4,09	143.541,74	4,53
<b>MALUKU</b>	8.858,83	0,25	8.842,71	0,28
<b>PAPUA</b>	65.735,64	1,86	62.818,00	1,98

**Sumber Data: BPS** Dominasi Jawa (dan Sumatera) sebagai pusat perekonomian

# Tabel Interregional Input-Output 2005

	Permintaan Antara								Ekspor	Total Permintaan Akhir	Total Output
	Sumatera	Java	Nusa Tenggara	Kalimantan	Sulawesi	Maluku	Papua	Total			
Sumatera	383.6	51.6	2.3	4.1	4.6	0.2	0.7	447.1	245.1	613.2	1,060.3
Java	63.6	1,295.6	4.3	17.0	15.9	1.2	3.0	1,400.5	436.9	1,834.9	3,235.4
Nusa Tenggara	0.2	5.3	25.5	0.1	0.0	0.0	0.0	25.5	10.0	46.6	72.1
Kalimantan	4.5	18.1	0.6	156.1	1.8	0.1	0.6	181.6	119.4	236.9	418.5
Sulawesi	0.6	8.5	0.2	0.9	67.2	0.1	0.2	77.7	22.3	124.6	202.3
Maluku	0.1	0.7	0.0	0.0	0.1	4.3	0.0	5.3	0.8	8.6	13.9
Papua	0.1	11.8	0.0	0.0	0.0	0.1	17.2	29.4	29.7	49.4	78.8
<b>Input Antara</b>	<b>452.7</b>	<b>1,391.6</b>	<b>27.3</b>	<b>178.2</b>	<b>89.8</b>	<b>6.0</b>	<b>21.3</b>	<b>2,167.1</b>	<b>864.3</b>	<b>2,914.2</b>	<b>5,081.3</b>
Gaji/Upah	153.0	546.6	14.0	51.1	42.3	2.6	16.3	825.9			825.9
Surplus usaha/ Profit	377.3	846.1	25.2	186.1	73.0	4.4	29.4	1,541.4			1,541.4
Depresiasi	33.9	142.1	2.7	17.7	9.4	0.6	4.0	210.4			210.4
Pajak tak langsung	22.8	80.4	1.9	9.2	3.9	0.2	2.6	121.0			121.0
Subsidi	-1.3	-7.4	-0.1	-0.7	-0.3	0.0	0.0	-9.7			-9.7
Impor	21.9	206.3	1.0	6.6	2.1	0.1	5.2	243.1		175.4	418.5
<b>Total Input Antara atau Nilai Tambah</b>	<b>607.6</b>	<b>1,814.1</b>	<b>44.8</b>	<b>270.0</b>	<b>130.4</b>	<b>7.8</b>	<b>57.4</b>	<b>2,932.2</b>		<b>175.4</b>	<b>3,107.5</b>
<b>Total Input</b>	<b>1,060.3</b>	<b>3,205.7</b>	<b>72.1</b>	<b>448.2</b>	<b>220.2</b>	<b>13.9</b>	<b>78.8</b>	<b>5,099.2</b>	<b>864.3</b>	<b>3,089.6</b>	<b>8,188.8</b>

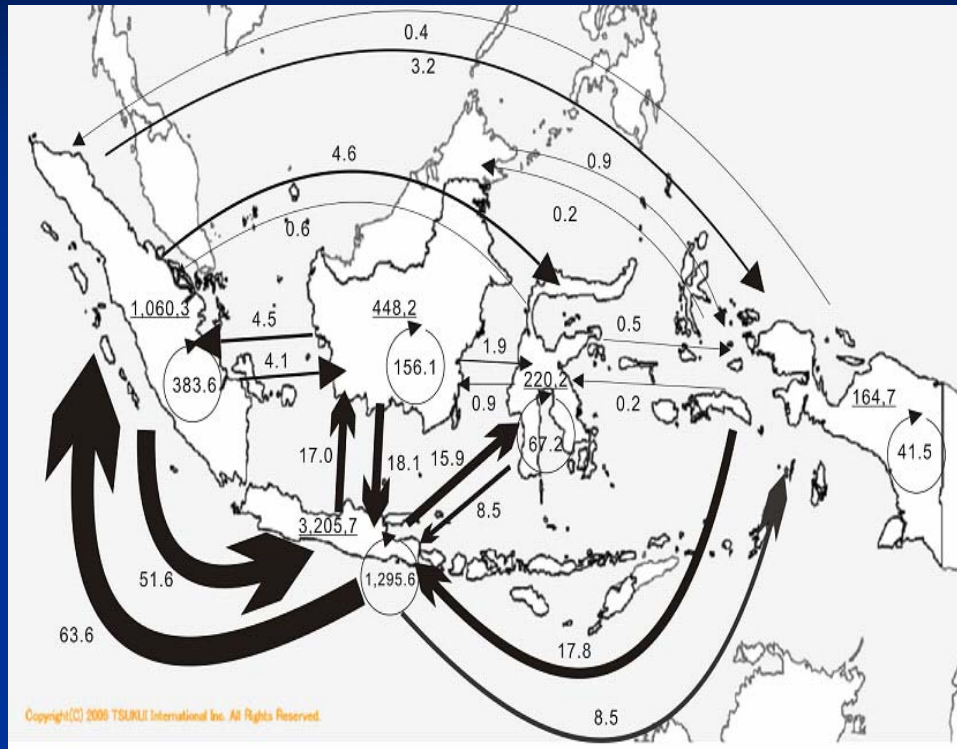
Dominasi Jawa sebagai pusat perekonomian

# DAMPAK BERGANDA ANTARWILAYAH (Interregional Multiplier)

Wilayah	Multiplier					
	Pendapatan	Surplus Usaha	Depresiasi	Pajak Pertambahan Nilai	Impor	Subsidi
Sumatera	1.774	1.707	1.812	1.772	2.079	1.893
Jawa	1.784	1.793	1.749	1.754	1.713	1.725
Nusa Tenggara	1.584	1.598	1.644	1.598	2.216	1.963
Kalimantan	1.728	1.736	1.675	1.691	2.018	1.710
Sulawesi	1.656	1.671	1.691	1.791	2.819	1.891
Maluku	1.529	1.535	1.471	1.592	4.66	1.653
Papua	1.372	1.388	1.385	1.381	1.393	1.408

Manfaat pertumbuhan ekonomi sebagian besar dinikmati Jawa

# PRODUKSI DAN TRANSFER ANTARWILAYAH 2005

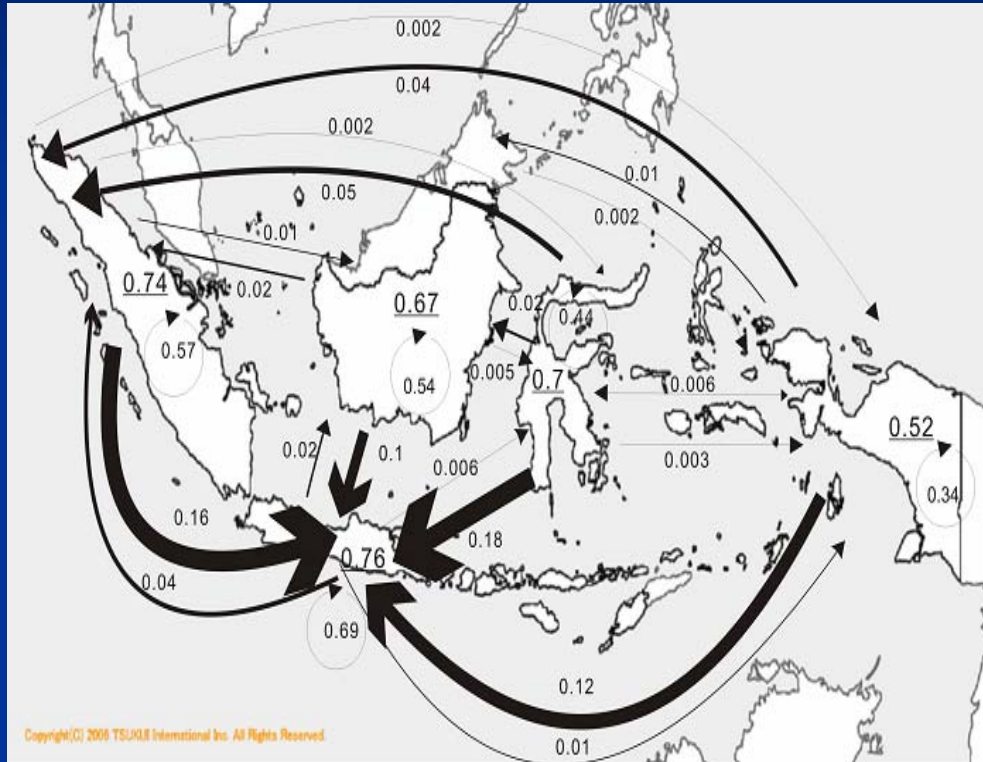


- Perdagangan antardaerah terpusat di Jawa dan Sumatera → Blok Ekonomi Utama.
- Perdagangan antardaerah di Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua masih relatif kecil dan belum berkembang → Wilayah ini percepatan pembangunan

Catatan: Arah panah menunjukkan arus perdagangan antarwilayah. Angka yang digarisbawahi menunjukkan produksi bruto di setiap wilayah. Angka dalam lingkaran menunjukkan input antara dalam wilayah.

Kesenjangan ekonomi wilayah menghambat perwujudan wawasan nusantara

# SPILLOVER EFFECT PERTUMBUHAN ANTARWILAYAH 2005



## Spillover effect:

Jawa > Sumatera > Sulawesi >  
Kalimantan > wilayah  
lainnya

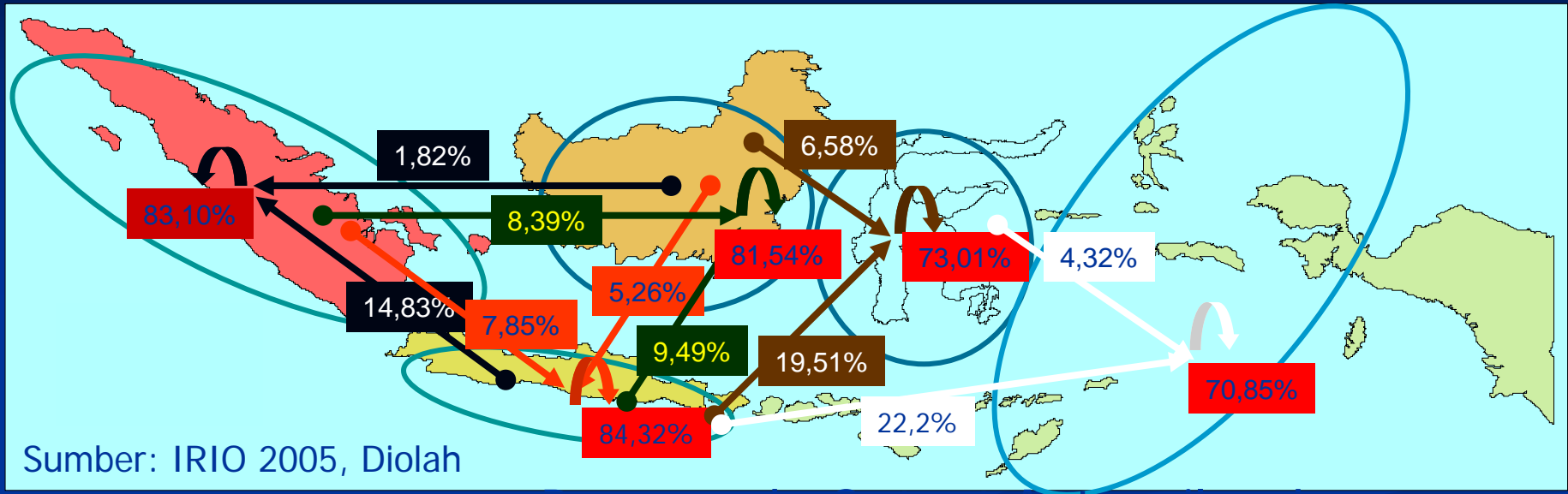
## Industri Unggulan:

Jawa dan Sumatera: Mesin,  
elektronik dan tekstil

Sulawesi, Kalimantan, Nusa  
Tenggara, Maluku dan Papua:  
Pengolahan sumber daya  
(pangan, minuman, kayu,  
tambang mineral dan  
kelautan)

Catatan: Angka dalam lingkaran dengan panah menunjukkan dampak berganda (spillover effect) dalam wilayah, anak panah menunjukkan dampak berganda (spillover effect) keluar wilayah dan angka garis bawah menunjukkan total dampak berganda (spillover effect).

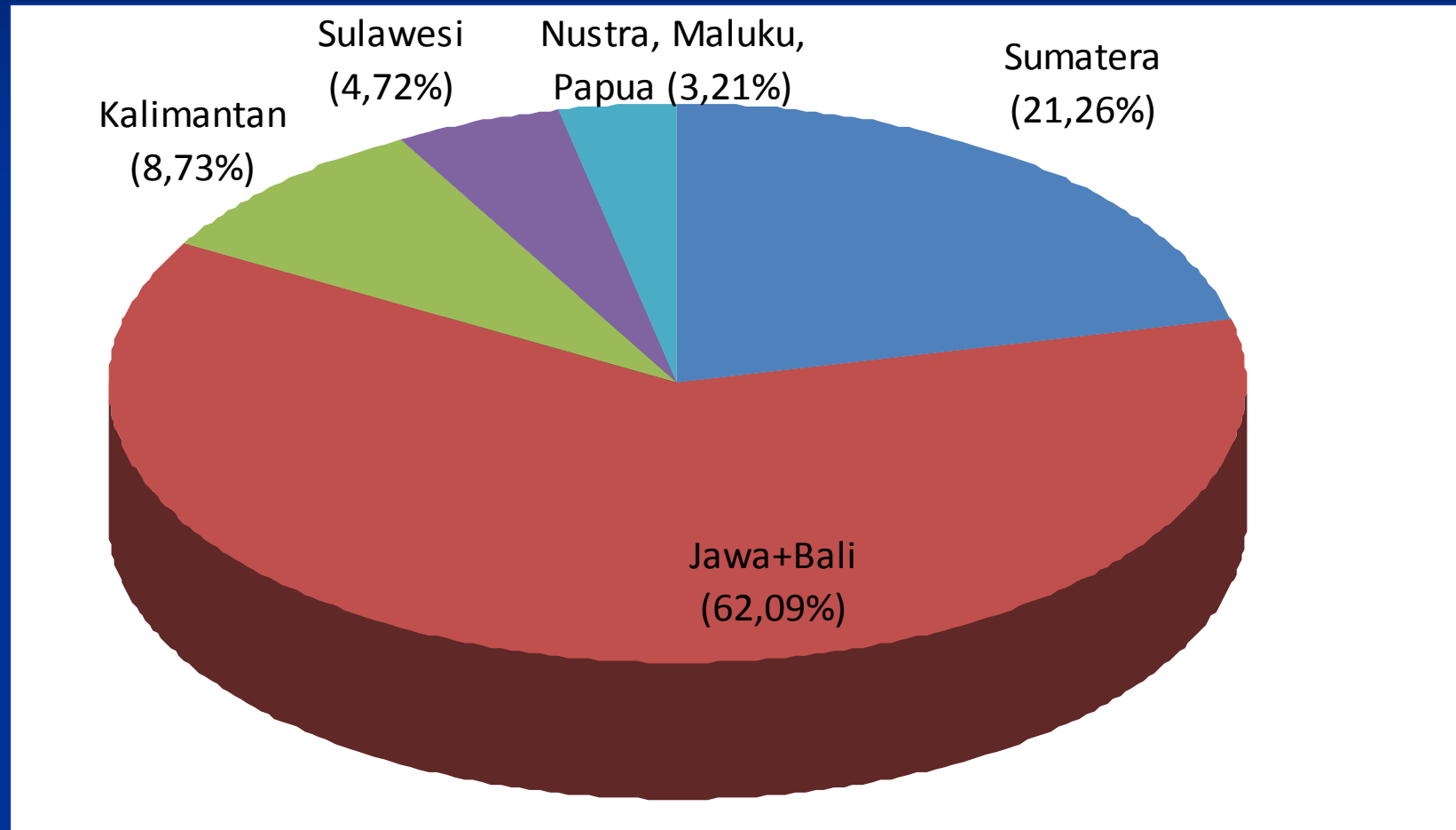
# KETERKAITAN PERDAGANGAN ANTARPULAU



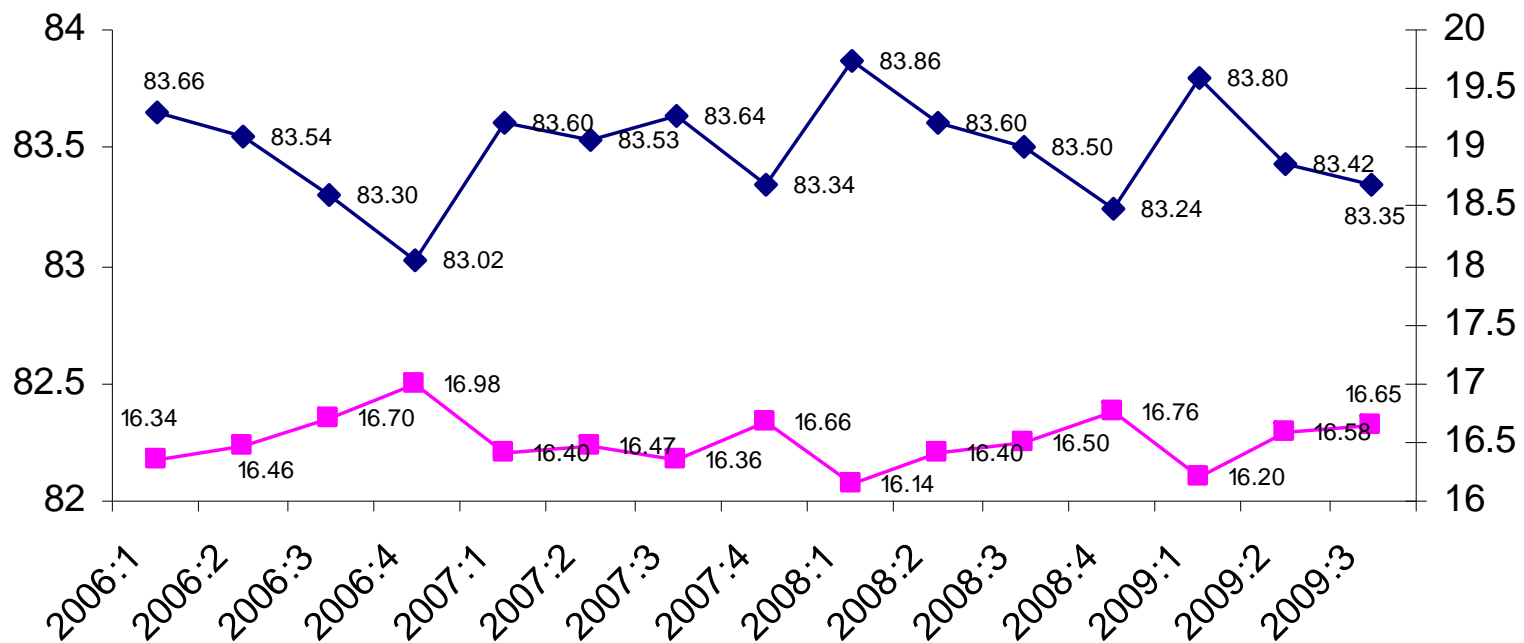
Perdagangan Intrawilayah	Wilayah	Sumatra	Jawa-Bali	Kalimantan	Sulawesi	Indonesia Timur
Perdagangan antarwilayah ke Sumatera	Sumatra	1.559	0.088	0.081	0.015	0.011
Perdagangan antarwilayah ke Jawa	Jawa-Bali	0.158	1.599	0.097	0.201	0.158
Perdagangan antarwilayah ke Kalimantan	Kalimantan	0.023	0.056	1.480	0.068	0.022
Perdagangan antarwilayah ke Sulawesi	Sulawesi	0.002	0.008	0.005	1.460	0.028
Perdagangan antarwilayah ke Indonesia Timur	Kep. Timur	0.003	0.017	0.002	0.009	1.307

Transaksi ekonomi hanya dalam wilayah, dan keterkaitan antarwilayah belum optimal

## KONTRIBUSI PDRB WILAYAH TERHADAP TOTAL PDRB 33 PROVINSI (HARGA KONSTAN, TR-3 2009)



# KONTRIBUSI PDRB WILAYAH KTI DAN WILAYAH KBI



- ◆ Kawasan Barat Indonesia
- Kawasan Timut Indonesia + Kalimantan

**Draft Awal**  
**Buku III RPJMN 2010-2014**

# Kerangka Analisis

## PEMETAAN WILAYAH PULAU BESAR

### IDENTIFIKASI KONDISI YANG ADA:

1. Sosial, Budaya, dan Kehidupan Beragama
2. Ekonomi
3. Sarana dan Prasarana
4. Politik
5. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
6. Hukum dan Aparatur
7. Pertahanan dan Keamanan
8. Wilayah dan Tata Ruang
9. Sumberdaya Alam dan Lingkungan

### IDENTIFIKASI KEBIJAKAN TERKAIT (SEKTORAL DAN REGIONAL):

1. Tujuan, sasaran, lokasi
2. Input program
3. Output yang diharapkan
4. Outcome yang diharapkan
5. Impact yang diharapkan
6. Investasi dan pembiayaan

### ANALISIS POTENSI WILAYAH:

1. Tingkat ketersediaan potensi
2. Tingkat pengelolaan/ eksploitasi potensi

### ANALISIS MASALAH:

1. Tingkat kesenjangan dan keparahan

### ANALISIS KEBIJAKAN:

1. Tingkat penanganan potensi, masalah dan fakta
2. Arah kebijakan dan target

ISU STRATEGIS

TUJUAN, SASARAN, INDIKATOR

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

# FORMAT NARASI DRAFT AWAL BUKU III RPJMN 2010-2014

- ✓ Bab 3.1 ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN WILAYAH
  - 3.1.1 Pendahuluan
  - 3.1.2 Arah RPJPN 2005-2025
  - 3.1.3 Arah Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN)
  - 3.1.4 Perkiraan Perkembangan Wilayah
  - 3.1.5 Gambaran Keterkaitan Antar Wilayah
  
- ✓ Bab 3.2 PENGEMBANGAN WILAYAH SUMATERA
  - 3.2.1 Kondisi Wilayah Sumatera Saat Ini**
    - 3.2.1.1. Capaian Pembangunan Wilayah**
    - 3.2.1.2. Isu Strategis**
  - 3.2.2 Arah Pengembangan Wilayah Sumatera**
    - 3.2.2.1. Tujuan dan Sasaran Pengembangan Wilayah**
    - 3.2.2.2. Strategi dan Arah Kebijakan**
  - Lamp. Matriks dan Peta Rencana Tata Ruang Pulau**
  
- ✓ Bab 3.3 – Bab 3.8 PENGEMBANGAN WILAYAH (JAWA-BALI, KALIMANTAN, SULAWESI, NUSA TENGGARA, MALUKU DAN PAPUA)

# DETIL NARASI RANCANGAN BUKU III RPJMN 2010-2014

## BAB PENGEMBANGAN TIAP WILAYAH

- ✓ Bab 3.3 – Bab 3.8 PENGEMBANGAN WILAYAH (SUMATERA, JAWA-BALI, KALIMANTAN, SULAWESI, NUSA TENGGARA, MALUKU DAN PAPUA)

### 3.2.1. Kondisi Wilayah Saat Ini

#### 3.2.1.1. Capaian Pembangunan Wilayah

Uraian perkembangan wilayah terkait pertumbuhan ekonomi, investasi, angkatan kerja (pengangguran), kemiskinan, IPM (pendidikan, kesehatan dan pendapatan perkapita) Degradasi Lingkungan dan lain-lain.

#### 3.2.1.2 Isu Strategis

Uraian secara umum mengenai isu strategis wilayah (pulau) yang merupakan kumpulan dari isu strategis provinsi dan lintas provinsi.

### 3.2.2. Arah Pengembangan Wilayah

#### 3.2.2.1. Tujuan dan Sasaran Pengembangan Wilayah

Berisi arahan pengembangan wilayah (pulau) serta tujuan dan sasaran yang perlu dicapai selama kurun waktu 2010-2014.

#### 3.2.2.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Berisi mengenai strategi dan arah kebijakan yang terkait pengurangan kesenjangan antarwilayah, optimalisasi sektor unggulan, peningkatan pertahanan dan keamanan, peningkatan kualitas SDA dan lingkungan hidup, serta pengembangan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) yang mengacu pada substansi Rencana Tata Ruang

**Lamp. Matriks Pengembangan Wilayah Per-Provinsi di Wilayah (Sumatera, Jawa Bali, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, Papua)**

# Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Wilayah (Buku III) dan Prioritas Program Kegiatan K/L (Buku II)



## PROYEKSI SEMENTARA BEBERAPA SASARAN WILAYAH

1. Proyeksi dilakukan dengan mempertimbangkan target yang ingin dicapai oleh Presiden terpilih, target MDGs, Proyeksi SUPAS 2005-2025, serta hasil kajian dan masukan dari Unit Kerja lain di Bappenas.
2. Asumsi target nasional tahun 2014: (a) Pertumbuhan ekonomi sebesar 6.8%; (b) Kemiskinan sebesar 9%; (c) Pengangguran sebesar 5.5%; (d) Angka Kematian Bayi sebesar 24 per 1000 kelahiran; (e) Angka Harapan Hidup sebesar 72 tahun dan (f) Rata-Rata Lama Sekolah sebesar 7,8 tahun.
3. Proyeksi dilakukan dengan menggunakan metode range dengan memperhitungkan share setiap provinsi terhadap nasional.
4. Masih perlu dilakukan penyempurnaan sasaran melalui penyempurnaan perhitungan dan masukan dari sektoral/daerah

# PERKIRAAN PERKEMBANGAN WILAYAH (1)

Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi		Kemiskinan		Pengangguran	
	Perkiraan		Perkiraan		Perkiraan	
	2010	2014	2010	2014	2010	2014
Aceh	4,5 – 5,0	5,5 – 6,1	20,55 – 20,01	14,47 – 14,06	7,4 – 8,2	5,7 – 6,3
Sumatera Utara	6,4 – 7,1	6,9 – 7,6	10,53 – 10,05	7,04 – 6,98	10,3 – 11,4	9,4 – 10,4
Sumatera Barat	4,4 – 4,8	6,0 – 6,5	7,73 – 7,24	4,51 – 4,44	8,4 – 9,3	7,5 – 8,3
Riau	4,6 – 5,0	6,5 – 7,2	8,51 – 8,11	5,47 – 5,32	5,8 – 6,4	5,6 – 6,2
Jambi	4,8 – 5,3	6,9 – 7,6	7,65 – 7,12	4,27 – 4,22	4,2 – 4,7	3,1 – 3,5
Sumatera Selatan	5,5 – 6,0	6,2 – 6,9	15,34 – 14,04	11,39 – 10,89	7,9 – 8,7	6,8 – 7,6
Bengkulu	4,5 – 5,5	6,2 – 6,9	16,51 – 16,07	12,03 – 11,91	2,6 – 2,9	1,6 – 1,9
Lampung	5,5 – 6,1	6,2 – 6,9	18,29 – 17,84	13,99 – 13,24	5,4 – 6,0	4,7 – 5,2
Bangka Belitung	4,9 – 5,5	6,1 – 6,7	6,37 – 6,01	3,68 – 3,55	3,7 – 4,1	2,4 – 2,7
Kepulauan Riau	7,0 – 7,4	7,5 – 8,2	7,66 – 7,13	4,46 – 4,21	3,3 – 3,7	1,5 – 2,4
DKI Jakarta	6,5 – 7,1	6,9 – 7,7	2,75 – 2,69	0,54 – 0,53	10,3 – 11,4	8,3 – 9,2
Jawa Barat	5,0 – 5,6	6,2 – 6,8	9,12 – 8,91	4,15 – 4,12	10,4 – 11,5	8,8 – 9,8
Jawa Tengah	6,2 – 6,8	7,1 – 7,7	14,92 – 14,34	11,58 – 11,37	7,1 – 7,8	5,4 – 6,0
DI Yogyakarta	4,8 – 5,3	6,2 – 6,9	15,36 – 15,03	11,87 – 10,76	5,5 – 6,1	4,3 – 4,7
Jawa Timur	5,8 – 6,4	7,1 – 7,8	14,62 – 14,24	11,23 – 10,95	6,5 – 7,2	5,7 – 6,3
Banten	5,9 – 6,4	6,5 – 7,2	6,79 – 6,23	3,13 – 3,09	15,4 – 17,0	14,9 – 16,5

# PERKIRAAN PERKEMBANGAN WILAYAH (1)

Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi		Kemiskinan		Pengangguran	
	Perkiraan		Perkiraan		Perkiraan	
	2010	2014	2010	2014	2010	2014
Bali	5,8 – 6,1	6,8 – 7,3	4,12 – 4,01	1,12 – 1,11	4,4 – 4,9	3,4 – 3,7
NTB	3,0 – 3,5	3,6 – 4,0	21,42 – 20,93	15,94 – 14,88	3,6 – 3,9	2,2 – 2,4
NTT	5,4 – 5,9	5,8 – 6,4	22,64 – 22,12	16,95 -16,87	1,7 – 1,9	1,2- 1,4
Kalimantan Barat	4,7 – 5,2	4,8 – 5,4	8,03 – 7,94	4,66 – 4,59	5,7 – 6,2	4,9 – 5,4
Kalimantan Tengah	5,0 – 5,6	6,1 – 6,7	6,94 – 6,61	3,61 -,3,57	3,9 – 4,3	2,9 – 3,3
Kalimantan Selatan	5,5 – 5,9	6,3 – 6,9	4,01 – 3,85	1,01 -1,01	5,1 – 5,6	3,9 – 4,3
Kalimantan Timur	3,0 – 3,5	3,6 – 4,1	5,87 – 5,52	2,03 – 2,01	8,2 – 9,1	5,5 – 6,1
Sulawesi Utara	5,7 – 6,3	7,1 – 7,8	9,17 – 8,86	3,05 – 3,02	9,9 – 11,0	8,2 – 9,0
Sulawesi Tengah	8,5 – 9,0	9,0 – 10,1	17,33 – 16,93	12,09 – 11,96	6,4 – 7,1	5,9 – 6,5
Sulawesi Selatan	6,2 – 7,2	7,5 – 8,3	11,28 -10,87	6,29 -6,04	6,8 – 7,6	4,7 – 5,2
Sulawesi Tenggara	7,5 – 7,9	8,0 – 8,5	17,95 – 17,49	14,14 – 14,01	3,7 – 4,1	2,1 – 2,3
Gorontalo	6,8 – 7,3	7,0 – 8,5	24,13 – 23,98	19,49 -18,56	4,6 – 5,0	2,9 – 3,2
Sulawesi Barat	5,8 – 6,5	6,2 – 7,0	14,06 – 13,93	10,03 - 9,99	4,1 – 4,5	2,7 – 3,0
Maluku	4,9 – 5,4	5,4 – 6,0	27,04 – 26,75	22,23 – 21,76	7,7 – 8,5	5,2 – 5,8
Maluku Utara	5,5 – 6,3	6,0 – 6,8	9,45 – 9,07	5,38 – 5,02	4,7 – 5,1	3,0 – 3,3
Papua Barat	6,2 – 6,8	7,0 – 7,6	34,94 -34,23	19,94 – 18,78	7,2 – 7,9	5,1 – 5,6
Papua	5,3 – 5,8	6,2 – 6,7	37,01 – 36,88	22,95 -21,56	3,7 – 4,1	2,7 – 6,5

# PERKIRAAN PERKEMBANGAN WILAYAH (2)

Provinsi	Angka Kematian Bayi		Rata-Rata Lama Sekolah		Angka Harapan Hidup	
	Perkiraan		Perkiraan		Perkiraan	
	2010	2014	2010	2014	2010	2014
Prov. NAD	32	30	8,90	9,30	69,08	69,93
Prov. Sumut	23	20	8,88	9,16	71,64	72,93
Prov. Sumbar	27	23	8,25	8,56	70,58	72,33
Prov. Kep. Riau	20	19	9,60	10,80	72,38	72,88
Prov. Riau	22	20	8,44	8,78	71,92	72,91
Prov.Sumsel	25	23	7,84	8,08	70,97	72,26
Prov. Kep. Babel	26	24	8,10	9,30	70,72	71,69
Prov.Jambi	27	24	7,84	8,08	70,43	71,70
Prov.Bengkulu	29	25	8,08	8,26	69,97	71,74
Prov. Lampung	25	21	7,86	8,42	70,98	72,99
Prov.Banten	32	29	8,50	8,90	69,26	70,49
Prov.DKI Jakarta	8	7	11,6	12,4	75,84	76,81
Prov.Jawa Barat	27	24	8,10	8,70	70,36	71,97
Prov.Jawa Tengah	21	18	7,44	8,08	72,21	73,64
Prov.DIY	9	8	8,98	9,46	75,62	76,84
Prov.Jawa Timur	25	21	7,46	8,02	71,09	72,97

# PERKIRAAN PERKEMBANGAN WILAYAH (2)

Provinsi	Angka Kematian Bayi		Rata-Rata Lama Sekolah		Angka Harapan Hidup	
	Perkiraan		Perkiraan		Perkiraan	
	2010	2014	2010	2014	2010	2014
Prov. Bali	13	12	8,24	8,88	70,09	74,64
Prov. KalBar	28	25	7,06	7,42	70,31	71,37
Prov. KalTeng	23	21	8,25	8,56	71,75	72,60
Prov. KalSel	34	30	7,68	7,96	68,54	70,55
Prov. KalTim	20	14	9,24	9,68	72,63	74,37
Prov.Sulut	12	9	8,96	9,12	74,47	75,88
Prov.Gorontalo	31	26	7,10	7,40	68,28	71,79
Prov.SulTeng	35	31	7,98	8,26	70,28	70,25
Prov.SulBar	28	24	7,50	8,70	69,82	72,04
Prov. SulSel	28	24	8,00	8,80	69,33	72,04
Prov.SulTra	30	25	7,90	8,20	70,28	71,75
Prov.NTB	44	37	7,06	7,42	66,18	68,66
Prov.NTT	32	27	6,68	6,96	69,25	71,48
Prov.Maluku Utara	35	29	9,00	9,40	68,42	70,89
Prov.Maluku	32	28	9,00	9,40	69,12	70,83
Prov.Papua Barat	32	27	7,57	8,37	69,13	71,50
Prov.Papua	31	27	6,58	6,86	69,38	71,46

# CONTOH RANCANGAN LAMPIRAN MATRIKS PENGEMBANGAN WILAYAH PER PROVINSI

**LAMPIRAN MATRIKS BUKU III RPJMN 2010-2014 WILAYAH SULAWESI**

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	WILAYAH	STRATEGI PENGEMBANGAN	FOKUS PRIORITAS
1. Tingginya Ketimpangan Pembangunan Antarwilayah 2. Belum optimalnya pengembangan komoditi unggulan yang berdaya saing tinggi di wilayah Sulawesi 3..... 4..... 5.....				

**LAMPIRAN MATRIKS DUKUNGAN BIDANG PER PROVINSI**

PROVINSI : .....

BIDANG	FOKUS PRIORITAS	SASARAN FOKUS PRIORITAS	KEGIATAN/ PROGRAM	INSTANSI PELAKSANA	ALOKASI DANA

# SINKRONISASI MATRIKS BUKU III FORMAT BARU DENGAN MATRIKS BUKU II

LAMPIRAN MATRIKS BUKU III RPJMN 2010-2014 WILAYAH SULAWESI				
ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	WILAYAH	STRATEGI PENGEMBANGAN	FOKUS PRIORITAS

LAMPIRAN MATRIKS DUKUNGAN BIDANG PER PROVINSI					
PROVINSI : .....					
BIDANG	FOKUS PRIORITAS	SASARAN	PROGRAM	INSTANSI PELAKSANA	ALOKASI DANA

## LAMPIRAN MATRIKS BUKU II RPJMN 2010-2014

**BIDANG PEMBANGUNAN :**  
**BIDANG PRIORITAS :**

FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM	INSTANSI PELAKSANA	ALOKASI DANA

Sinkronisasi Pada Fokus Prioritas di Buku II dan Buku III

# BEBERAPA HAL YANG BARU LAINNYA DALAM RPJMN 2010-2014

## ■ Lebih akuntabel

- Disusun berdasarkan perencanaan kinerja yang terukur lengkap dengan penanggung-jawabnya
- Struktur tanggung-jawab pencapaian prioritas nasional lebih jelas

## ■ Lebih Implementatif

- Sasaran dan indikasi pagu dirinci pertahun;
- Pagu jangka menengah disusun dalam pagu “*baseline*”;
- Rencana kerja yang tercantum bukan lagi sebagai “*wish list*”
- Menjadi rujukan penyusunan kerangka pengeluaran jangka menengah (KPJM);

# Aspek-aspek Yang Perlu Diintegrasikan Antara Pembangunan Nasional dan Pembangunan Daerah

## ■ Pembangunan sektoral di Daerah:

- 1) Mengarahkan dan menjaga sinergi antarsektor.
- 2) Sinergi antara Pusat dan Daerah.
- 3) Kebijakan penganggaran (Dekon, TP, Transfer).

## ■ Pembangunan Oleh Daerah itu Sendiri:

- 1) Mengarahkan kerjasama antardaerah.
- 2) Koordinasi dan sinergi antara Provinsi dan Kabupaten/Kota.

## ■ Pembangunan Kapasitas Pemerintahan Daerah:

Aparatur, Kelembagaan, Keuangan → SPM terbentuk dan terlaksana.

## Beberapa Kebijakan Nasional Pembangunan Daerah

- Kebijakan insentif fiskal dan perpajakan;
- Kebijakan perimbangan keuangan: transfer ke daerah
- Kebijakan pembangunan perkotaan dan perdesaan, termasuk transmigrasi
- Kebijakan pembangunan sektoral ke dan di daerah
- Kebijakan desentralisasi dan pengembangan kapasitas pemerintahan daerah memperkuat otonomi daerah;
- Kebijakan pengembangan kawasan pertumbuhan ekonomi;
- Kebijakan kerjasama antar daerah dan kerjasama ekonomi regional (segitiga pertumbuhan);
- Kebijakan Tata Ruang dan Pertanahan;
- Dll.

# Rencana Pengembangan Wilayah Sulawesi

Pengembangan sektor unggulan perikanan dan pariwisata bahari di Provinsi Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan

Pengembangan produksi dan industri pengolahan komoditi unggulan tanaman pangan padi dan jagung untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional di wilayah Sulawesi

Pengembangan komoditi unggulan perkebunan yang didukung dengan industri pengolahan di wilayah Sulawesi

Pengembangan komoditi unggulan pertambangan nikel, aspal, serta minyak dan gas bumi yang didukung dengan industri pengolahan secara berkelanjutan di Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara

Mendorong pengembangan PKN Kawasan Perkotaan Makassar-Maros-Sungguminasa- Takalar (Mamminasata) sebagai pusat pengembangan jasa pemerintahan, perdagangan, industri, perikanan tangkap, pertanian, dan pariwisata

Mendorong pengembangan PKN Kawasan Perkotaan Manado-Bitung sebagai pusat pengembangan jasa pemerintahan, perdagangan dan jasa, industri, dan pariwisata

Mendorong pengembangan PKN Kawasan Perkotaan Gorontalo sebagai pusat pengembangan jasa pemerintahan, perdagangan, industri pengolahan, perikanan tangkap, pertanian, perkebunan, pendidikan, dan pariwisata

Mendorong pengembangan PKN Kawasan Perkotaan Palu sebagai pusat pengembangan jasa pemerintahan, perdagangan, industri pengolahan, perikanan tangkap, pertanian, perkebunan, pendidikan, dan pariwisata

Pengembangan jaringan transportasi yang terpadu untuk mewujudkan keseimbangan perkembangan antar wilayah, membuka keterisolasian dan melayani pulau-pulau kecil

Pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin di perdesaan di wilayah Sulawesi

Meningkatkan produksi energi listrik sistem Suluttenggo dan Sistem Sulserabar , serta peningkatan energi listrik di daerah pulau-pulau kecil terluar

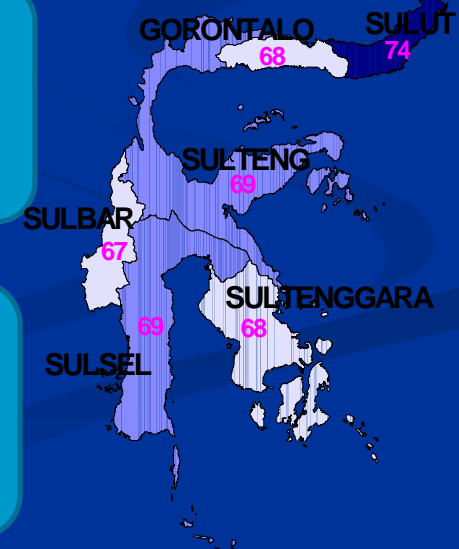
Mendorong pengembangan PKN Kawasan Perkotaan Kendari sebagai pusat pengembangan jasa pemerintahan, perdagangan, perkebunan, perikanan tangkap, dan pariwisata

Pengembangan kawasan perbatasan negara PKSN Tahuna dan PKSN Melonguane, dengan pendekatan kesejahteraan, keamanan, dan lingkungan hidup

Pengembangan jaringan transportasi secara terpadu untuk mendukung pelayanan kawasan perkotaan sebagai pusat pengembangan sektor-sektor unggulan antarwilayah di wilayah Sulawesi

Percepatan pembangunan daerah tertinggal dan terpencil di wilayah Gorontalo, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat

Mengembangkan kawasan perkotaan nasional PKN Manado-Bitung, PKN Palu, PKSN Tahuna dan Melonguane berbasis mitigasi bencana



# Rencana Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara

Peningkatan akses dan kualitas pendidikan

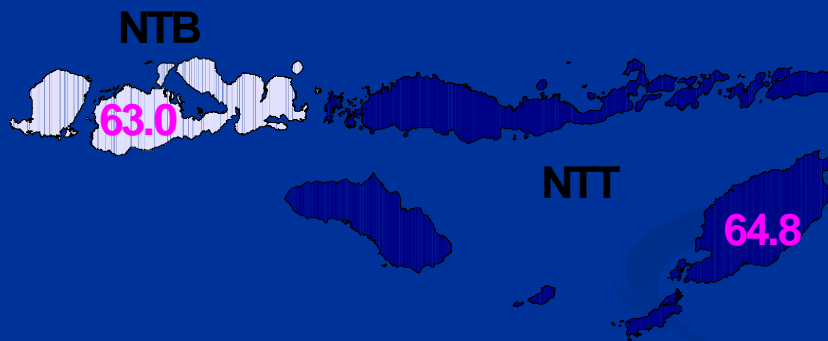
Peningkatan akses fasilitas kesehatan

Pengembangan ekonomi lokal

Pengembangan pariwisata bahari

Pengembangan tata pemerintahan daerah yang baik

Pengembangan PKS N untuk meningkatkan kesejahteraan dan penguatan pertahanan keamanan di kawasan perbatasan



Penanggulangan konflik sosial secara partisipatif

Pengembangan infrastruktur yang dapat menghubungkan antar kota, pulau-pulau, wilayah tertinggal dan wilayah terpencil

Pengembangan konservasi sumberdaya lingkungan secara partisipatif

Pengembangan PKN Mataram dan Kupang sebagai pusat industri pengolahan komoditas unggulan dan pariwisata

Optimalisasi pengembangan sentra produksi komoditas unggulan di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur

# Rencana Pengembangan Wilayah Maluku

Optimalisasi pengembangan sektor dan komoditas unggulan di Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara

Pengembangan PKN Ambon dan Ternate-Sofifi untuk mendorong pengembangan komoditas unggulan

Pengembangan PKS N untuk meningkatkan kesejahteraan dan penguatan keamanan di wilayah perbatasan secara terpadu

Peningkatan akses terhadap kredit usaha kecil

Peningkatan produksi bahan pangan

**MALUKU UTARA**

62.8

Peningkatan akses infrastruktur

Penanggulangan pengangguran, kemiskinan dan modal melalui pengelolaan komoditas unggulan

Penguatan kinerja tata pemerintahan yang baik

Peningkatan keharmonisan hubungan antar suku bangsa dan penganut keagamaan

Peningkatan akses terhadap fasilitas kesehatan

66.1 **MALUKU**

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan tata ruang

Peningkatan akses terhadap fasilitas pendidikan

Pengembangan ekonomi lokal

# Rencana Pengembangan Wilayah Papua

Optimalisasi pengembangan sektor dan komoditas unggulan

Pengembangan PKN Sorong, Timika, Jayapura untuk mendorong pengembangan komoditas unggulan

Pengembangan PKN Jayapura sebagai pusat pelayanan administrasi pelintas batas negara, pusat pertumbuhan wilayah nasional dan outlet pemasaran komoditas unggulan

Penguatan keterpaduan antara peningkatan kesejahteraan dan penguatan keamanan di wilayah perbatasan

Pelestarian keragaman hayati di wilayah Papua

Peningkatan kesadaran terhadap hak asasi manusia

Pengintegrasian hukum adat ke dalam proses pembangunan

Penanggulangan HIV/AIDS secara preventif dan kuratif

Peningkatan akses terhadap fasilitas kesehatan

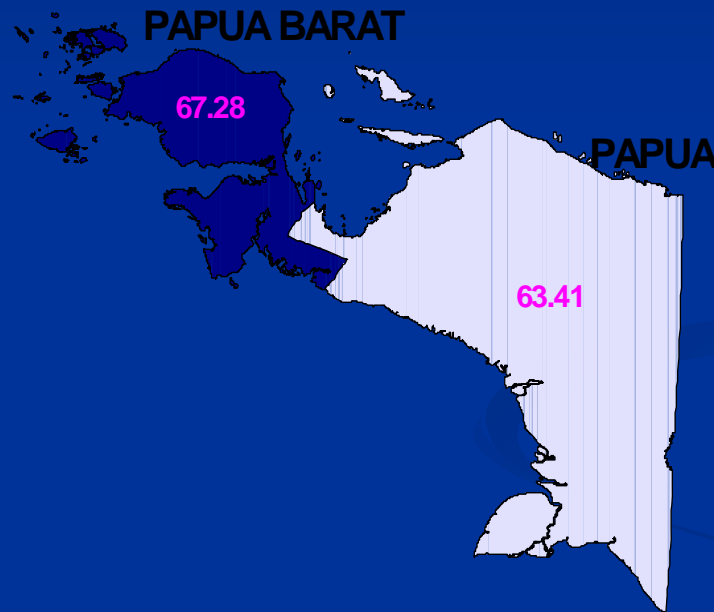
Peningkatan akses terhadap pendidikan dasar dan menengah

Peningkatan cakupan dan sebaran infrastruktur

Penguatan tata pemerintahan yang baik melalui koridor otonomi khusus

Penanggulangan kemiskinan

Pengembangan ekonomi lokal



# Penutup

1. Visi Misi Pembangunan 2014 beserta 11 Prioritas Nasional telah dituangkan dalam Rancangan Awal RPJMN 2010-2014;
2. RPJMN adalah pedoman bagi pemerintah (baik di pusat maupun di daerah) dan masyarakat untuk lima tahun ke depan;
3. Untuk itu, RPJMN dituntut lebih akuntabel, lebih terukur, dan realistis.
4. Perlu dukungan semua pihak untuk mewujudkannya.

Terima Kasih.